

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mesir telah menjadi tujuan pengungsi Palestina sejak konflik Israel-Palestina dimulai pada tahun 1948, yang mengakibatkan pembentukan negara Israel dan eksodus besar-besaran penduduk Palestina dari wilayah mereka. Sejak saat itu, Mesir telah menjadi tujuan bagi banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari konflik dan kekerasan di wilayah mereka. Pada awalnya, sebagian besar pengungsi Palestina di Mesir adalah orang-orang yang melarikan diri selama Perang Arab-Israel 1948 (dikenal sebagai Nakba) dan Perang Enam Hari tahun 1967, ketika Israel merebut Jalur Gaza dan Tepi Barat (Aljazeera, 2017). Mesir memperluas bantuan dan tempat tinggal bagi pengungsi Palestina yang melarikan diri selama periode tersebut.

Selama bertahun-tahun, Mesir telah menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Palestina melalui kamp-kamp pengungsi dan juga memberikan beberapa hak, seperti akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Pada tahun 2021, terdapat sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di wilayah operasional UNRWA, yang mencakup Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat (UNRWA, 2021). Namun, status dan perlakuan pengungsi Palestina di Mesir telah bervariasi sepanjang waktu, tergantung pada situasi politik, keamanan, dan kemanusiaan yang berkembang. Meskipun Mesir telah menjadi tujuan bagi pengungsi Palestina selama beberapa dekade, penting untuk dicatat bahwa ada batasan-batasan dan kendala-kendala bagi pengungsi Palestina di Mesir, termasuk dalam hal pergerakan, akses ke pekerjaan formal, dan kewarganegaraan. Mesir juga telah mengalami perubahan dalam pendekatan dan kebijakan terhadap pengungsi Palestina sepanjang waktu, terutama dalam konteks dinamika politik regional yang terus berubah.

Mesir telah lama menunjukkan solidaritas dengan Palestina dalam konteks perjuangan umat Arab melawan pendudukan dan ketidakadilan. Solidaritas ini, yang sering kali diperkuat oleh narasi pan-Arabisme, dapat mendorong Mesir untuk mendukung hak-hak Palestina, termasuk hak pengungsi Palestina. Sebagai negara mayoritas Muslim, nilai-nilai Islam juga dapat memengaruhi pandangan Mesir terhadap pengungsi Palestina. Pemahaman tentang kewajiban moral dalam Islam untuk membantu mereka yang teraniaya dan menderita dapat memperkuat dukungan Mesir terhadap pengungsi Palestina (Fahadayna, 2013).

Rencana Pemisahan PBB tahun 1947, yang mengarah pada pembagian wilayah Palestina menjadi Israel dan Palestina sebagai negara merdeka dan menjadikan Yerusalem sebagai kota resmi PBB, memicu konflik antara Israel dan Palestina. Namun, perdebatan di antara keduanya juga tidak kunjung usai. Pihak Arab percaya bahwa pembagian PBB atas kedua wilayah tersebut tidak adil karena memberikan lebih banyak keuntungan bagi Israel daripada Palestina. Konflik Israel-Palestina muncul kembali pada 30 November 1947, ketika serangan teroris dan perang gerilya dilancarkan oleh orang-orang Arab karena ketidakmampuan untuk mencapai penyelesaian (Pratama et al., 2023).

Setelah Israel secara resmi mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka yang diakui oleh AS dan Uni Soviet pada bulan Mei 1948, ketegangan mencapai puncaknya. Situasi ini juga menyebabkan sejumlah perselisihan Arab dengan Israel, yang membuat Liga Arab geram dan mendorong mereka untuk menyatakan perang. Dalam sebuah pesan kepada PBB, Jamal al Hussayni, delegasi tertinggi Komite Arab pada saat itu, menjelaskan bahwa pasukan Liga Arab berada di sana untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina sebagai mayoritas dari penjajahan Zionis Yahudi (Wibowo, 2014). Selama beberapa minggu, Liga Arab berhasil mengepung Israel hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dan mengakhiri permusuhan tersebut.

Karena sebuah ayat suci dalam Taurat (Pentateukh) yang merujuk pada tanah Kanaan (Palestina), yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya sebagai pusat perjanjian antara Tuhan dan umat Israel, desakan Israel atas wilayah

Palestina terkait erat dengan sejarah teologis mereka. Bangsa Yahudi memiliki hubungan religius dan historis yang sangat mendalam dengan wilayah tersebut. Bangsa Yahudi memandang tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel di Kanaan sebagai bukti kesetiaan-Nya, seperti yang tercatat dalam kitab Yosua (Pratama et al., 2023). Akibatnya, legalitas Israel yang kuat dalam mengklaim kepemilikan tanah Palestina didasarkan pada fakta ini.

Salah satu konflik terlama di dunia adalah konflik Israel-Palestina, yang belum terselesaikan. Mengingat banyaknya aspek politik, ekonomi, dan agama yang terlibat dalam perjuangan ini, serta akar sejarah yang dalam dari masing-masing pihak, membuat klaim yang saling tumpang tindih menjadi sangat kompleks. Keinginan minoritas Yahudi Eropa untuk memiliki tanah air Yahudi pada awal abad ke-19 telah menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina (Wibowo, 2014).

Konflik Israel-Palestina kembali pecah pada tanggal 7 Oktober 2023. Hamas melakukan serangan gabungan yang menargetkan wilayah Israel. Serangan gabungan ini melibatkan serangan udara dan darat terhadap beberapa wilayah perbatasan Israel. Ini adalah konflik langsung pertama di wilayah Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1948 (Erlanger, 2023). Serangan udara berbasis roket diluncurkan pada pukul 6 pagi terhadap kota-kota pesisir Ashdod dan Ashkelon, serta sejauh Tel Aviv, yang terletak sekitar 70 kilometer di utara Gaza. Selain itu, ada banyak pelanggaran terhadap penghalang keamanan oleh sekitar 1.000 teroris Hamas (Kingsley & Bergman, 2023). Setelah serangan mendadak, Israel menyatakan perang, membombardir Gaza, dan terlibat dalam pertempuran untuk mengusir pasukan Hamas pada 8 Oktober 2023. Setelah serangan mendadak, Israel menyatakan perang, membombardir Gaza, dan terlibat dalam pertempuran untuk mengusir pasukan Hamas pada 8 Oktober 2023. Menurut laporan, Hamas pertama kali menerobos perbatasan dengan mengirimkan pesawat tempur khusus dengan pesawat layang gantung. Begitu masuk, para militan menghancurkan tembok dan gerbang listrik dengan bahan peledak. Kemudian, menurut laporan, bulldoser digunakan di beberapa lokasi untuk memberi ruang bagi lebih banyak pejuang untuk masuk ke Israel.

Sepanjang perbatasan Gaza-Israel, telah terjadi beberapa insiden pertempuran. Di kota perbatasan Sderot, misalnya, teroris Hamas telah menguasai kantor polisi setempat. Senin, 9 Oktober, terjadi pertempuran antara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Hamas, dengan para militan yang berkemah di beberapa tempat di sebelah timur Gaza, saling bertukar tembakan dengan pihak Israel (Marco, 2023). Pasukan Pertahanan Israel mulai menyerang daerah-daerah sipil dan kompleks-kompleks di Jalur Gaza yang dianggap sebagai rumah bagi para pemimpin Hamas. Dilaporkan bahwa jet-jet tempur Israel telah menyerang lebih dari 1.000 target, termasuk masjid, bangunan tempat tinggal, dan kantor stasiun radio (Goldenberg & Shurafa, 2023). Rumah sakit Gaza diserbu saat ratusan orang terbunuh dan terluka dalam serangan Israel, sebagian besar kota timur laut Beit Hanoun di Gaza hancur akibat serangan udara. Lebih dari 50 orang dilaporkan tewas pada 9 Oktober dalam serangan udara yang menargetkan area pasar di kamp pengungsi Jabalia, yang terletak tepat di utara Kota Gaza.

Sejak 7 Oktober, serangan udara Israel terus berlanjut di daerah kantong pesisir tersebut; menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 8.000 orang telah tewas di sana, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Selama tiga minggu pertama operasi, Pasukan Pertahanan Israel menembakkan lebih dari 8.000 rudal ke Jalur Gaza, tingkat serangan udara yang tak tertandingi. Lebih dari 600 serangan udara dilaporkan terjadi di 54 lokasi selama periode ini (Marco, 2023). Meskipun luas Gaza hanya 360km persegi, ini merupakan serangan udara terbanyak yang pernah tercatat dalam satu bulan di negara atau wilayah Timur Tengah mana pun sebelum tahun 2020.

Israel telah membombardir setiap bagian dari Jalur Gaza dengan ratusan serangan udara, namun serangan yang paling intensif terjadi di utara Kota Gaza. Meskipun 600.000 orang diperkirakan masih berada di bagian utara Gaza, Israel telah memperingatkan bahwa tempat penampungan di bagian utara jalur tersebut tidak aman dan meminta penduduk untuk mengungsi (Gritten, 2023). Pada tanggal 19 Oktober, lima rudal IDF menghantam Gereja Ortodoks Yunani di Kota Gaza, menewaskan sedikitnya 16 warga Palestina. Selain itu, Israel melancarkan serangan udara di dekat fasilitas medis dan meningkatkan tekanan pada institusi-institusi di

Gaza utara, terutama Rumah Sakit al-Quds, yang menampung ratusan pasien dan lebih dari 14.000 pengungsi, untuk mengungsi (Al Jazeera, 2023). Pasukan Israel juga tetap menargetkan daerah-daerah di bagian selatan meskipun ada instruksi untuk mengungsi.

Selama lebih dari satu tahun, telah terjadi peningkatan ketegangan di Tepi Barat akibat meningkatnya konflik antara kelompok-kelompok bersenjata dan tentara IDF. Lebih dari 175 konflik kekerasan di Tepi Barat telah didokumentasikan sejak serbuan Hamas pada awal Oktober. Selain menembaki instalasi dan pos pemeriksaan militer Israel, para militan Palestina juga bertempur dengan personel IDF ketika penggerebekan dilakukan untuk menangkap mereka. Di kamp pengungsi Jenin, pasukan IDF dan teroris Katibat Jenin terlibat dalam pertempuran pada tanggal 25 Oktober. Empat warga Palestina juga tewas dalam serangan udara yang tidak biasa. Sementara itu, sejak 7 Oktober, tampaknya telah terjadi sekitar 600 protes dan kerusuhan yang terdokumentasi di mana pasukan Israel telah menewaskan sekitar 80 orang Palestina yang tidak bersenjata.

Di Tepi Barat, kekerasan pemukim terhadap warga Palestina juga meningkat baru-baru ini, mencapai puncaknya pada tingkat bulanan pada bulan Oktober. Ini lebih dari dua kali lipat jumlah peristiwa bersenjata yang melibatkan pemukim selama periode sulit sebelumnya pada Mei 2021, ketika kerusuhan di Palestina dan Israel dipicu oleh letusan kekerasan di masjid al-Aqsa di Yerusalem (VOA, 2023). Jumlahnya juga lebih dari 20 kali lipat pada bulan September. Selain menggunakan kekerasan, para pemukim yang melakukan kerusuhan juga terkait dengan ratusan warga Palestina yang diduga terdorong untuk meninggalkan Tepi Barat dan pindah ke tempat lain sebagai akibat dari kekerasan Israel. Mereka kemungkinan besar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintensifkan upaya mereka untuk merebut lebih banyak tanah di Tepi Barat.

Sejak 7 Oktober, hampir 1,9 juta orang yang merupakan 80% populasi telah dipaksa meninggalkan Jalur Gaza. Meskipun tersebar di seluruh dunia, sebagian besar orang Palestina adalah orang Timur Tengah. Namun, hanya warga Palestina yang memiliki kartu identitas atau yang terdaftar sebagai pengungsi yang masuk dalam perhitungan Badan Pusat Statistik Palestina (AA, 2023). Oleh karena itu,

mungkin ada populasi diaspora yang jauh lebih besar secara keseluruhan. Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa ada lebih dari enam juta orang Palestina yang tinggal di negara-negara Arab. Menurut data tersebut, hampir 50% dari orang-orang buangan ini tinggal di Yordania, yang berbatasan langsung dengan Israel. Mayoritas warga Palestina yang tinggal di Yordania adalah warga negara penuh dan memiliki akses ke semua hak istimewa lainnya. Lebih dari satu juta orang Palestina diperkirakan tinggal di Lebanon, Suriah, dan Mesir.

Meski begitu saat ini para pengungsi dari Palestina menghadapi kesulitan lain karena Mesir menyatakan bahwa mereka menolak pengungsi Palestina. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menolak untuk mengizinkan masuknya pengungsi dari Gaza, dengan alasan kekhawatiran akan adanya konflik warga Palestina dengan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan regional (Neuman, 2023). Penolakan ini berasal dari kekhawatiran mereka bahwa Israel bermaksud untuk memaksa warga Palestina untuk meninggalkan negara mereka secara permanen dan meninggalkan aspirasi mereka untuk merdeka. El-Sissi menambahkan bahwa migrasi besar-besaran akan berisiko menarik para ekstremis ke Semenanjung Sinai di Mesir, yang kemudian akan melancarkan serangan terhadap Israel, sehingga membahayakan kesepakatan damai yang telah berlangsung selama empat puluh tahun antara kedua negara.

### **1.2 Pertanyaan Riset**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah “Mengapa Pemerintah Mesir menolak pengungsi Palestina pada Perang Israel-Hamas tahun 2023 ditinjau melalui perspektif keamanan ontologis?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan penolakan Mesir terhadap pengungsi Palestina dalam perspektif keamanan ontologis

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini berupa:

**Manfaat teoritis** yakni sebagai sumber pengetahuan mengenai penolakan Mesir terhadap pengungsi Palestina dilihat dari perspektif lain yakni keamanan ontologis.

**Manfaat praktis** yakni nantinya dapat digunakan sebagai sumber penelitian mengenai hal yang berkaitan dengan keamanan ontologis.

